

**KOMITMEN POLITIK PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN BONE KABUPATEN MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Nanda Amalya
NPP. 30.1360

*Asdaf Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Politik Indonesia Terapan*

Email : nandaamalya30072000@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Teguh Ilham, S. STP., M.Arts

ABSTRACT

Problem Statement / Background (GAP): *Child stunting is categorized as a chronic nutritional problem motivated by many factors such as socioeconomic conditions, nutrition of pregnant women, pain in infants and insufficient nutritional intake in infants and pregnant women. The problem of stunting in Bone District, Muna Regency, Southeast Sulawesi Province, which has a good stunting journey with the achievement of stunting prevalence decreases in time. Behind its success, it is possible to have a good political commitment.*

Purpose: *The purpose of this study is to determine the Political Commitment of Local Governments in Bone District, Muna Regency, Southeast Sulawesi Province in reducing stunting prevalence, highlighted in the commitment here are aspects of law enforcement and business sustainability.*

Method: *The theory used is the theory of commitment from brinkerhoff. The research method used is qualitative research with a descriptive approach with data collection techniques for literature studies and field studies, the data sources used are primary and secondary.*

Results: *The findings of this study show that the success of a policy is judged based on its political commitment. In policies related to stunting in Bone District, Muna Regency, Southeast Sulawesi Province, it is already good, but in its implementation, there are still several obstacles, including in the dimensions of law enforcement and business sustainability.*

Conclusion: *Prevention and reduction of stunting in Bone sub-district has carried out various ways so that stunting can be reduced every year.*

Keywords: *Political Commitment, Local Government, Stunting, Prevention, Decline*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Anak stunting dikategorikan sebagai permasalahan gizi kronik yang dilatarbelakangi oleh banyak faktor contohnya kondisi sosial ekonomi, gizi ibu hamil, kesakitan pada bayi serta asupan gizi kurang pada bayi maupun ibu hamil. Permasalahan stunting di Kecamatan Bone Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki perjalanan stunting baik dengan pencapaian prevalensi stunting turun dalam waktu. Dibalik kesuksesannya maka memungkinkan terdapat komitmen politik yang baik. **Tujuan:** Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui Komitmen Politik Pemerintah Daerah di Kecamatan Bone Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menurunkan prevalensi stunting, yang disorot dalam komitmen di sini adalah aspek penegakan hukum dan keberlanjutan usaha. **Metode:** Teori yang digunakan yakni teori komitmen dari brinkerhoff. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif

dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan, sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. **Hasil/ Temuan :** Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa berhasilnya suatu kebijakan dinilai berdasarkan komitmen politiknya. Dalam kebijakan terkait stunting di Kecamatan Bone Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara memang sudah baik namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan termasuk dalam dimensi penegakan hukum dan keberlanjutan usaha. **Kesimpulan :** Pencegahan dan penurunan stunting di kecamatan Bone telah melakukan berbagai macam cara agar stunting dapat berkurang setiap tahunnya.

Kata Kunci: Komitmen Politik, Pemerintah Daerah, Stunting, Pencegahan, Penurunan

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan Kesehatan mempengaruhi kesejahteraan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Di Indonesia, angka prevalensi Stunting tahun 2020 diperkirakan turun menjadi 26,92%. Penurunan angka Stunting diprediksi sebesar 0,75% dibandingkan dengan tahun 2019 (27,67%). Namun angka tersebut jika dibandingkan dengan ambang batas prevalensi Stunting menurut WHO, masih berada pada kategori tinggi. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi Balita Stunting sebesar 24,4% pada 2021. Artinya, hampir seperempat Balita Indonesia mengalami Stunting. Namun, demikian, angka tersebut lebih rendah dibanding 2020 yang diperkirakan mencapai 26,92%. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung mendapatkan risiko kematian dini di kemudian hari karena organ vital yang tidak pernah berkembang sepenuhnya selama masa pertumbuhan. Anak-anak yang kekurangan gizi akan lebih mudah resisten terhadap infeksi serta lebih berpotensi meninggal karena penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut dan diare.

Dari 100 lokasi kabupaten yang menjadi fokus intervensi gizi terintegrasi pemerintah Indonesia, Kabupaten Muna tidak masuk daftar tersebut, hanya satu kabupaten yakni Kabupaten Buton yang menjadi fokus di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 prevalensi pendek anak balita yaitu 20.6%, dan sangat pendek 8.9%. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan, prevalensi pendek anak balita 21.2% dan sangat pendek yaitu 15.2% . Kemudian pada tahun 2018 prevalensi balita yang mengalami *Stunting* sebanyak 34.2% (Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, 2019). Berdasarkan data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SGBI) Tahun 2021, angka prevalensi Stunting di Sulawesi Tenggara sebesar 30.02 % lebih besar dibandingkan dengan angka Stunting nasional yang sebesar 24,4 %. Kabupaten Muna menyumbang 30,08 Permasalahan stunting membutuhkan komitmen langsung dari seorang pemimpin, sebagai seorang yang memimpin berjalannya proses pembangunan maka diharuskan seorang pemimpin itu membuat rancangan strategis untuk menanggulangi stunting khususnya di lokasi yang memiliki angka stunting tinggi.

1.2 Kesenjangan masalah yang diambil (GAP Penelitian) Studi tentang memiliki Komitmen Politik Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Dan Penurunan *Stunting* Di Kecamatan Bone Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki GAP (kesenjangan) dalam penelitian yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Berikut adalah GAP yang mungkin ada dalam penelitian tersebut Permasalahan stunting di Kecamatan Bone Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki perjalanan stunting baik dengan pencapaian prevalensi stunting turun dalam waktu. Dibalik kesuksesannya maka memungkinkan terdapat komitmen politik yang baik.

1.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelitian dengan mengacu pada penelitian terdahulu sehingga peneliti dapat membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian Nur Azizah, N. Anwar Sadat (2022) dengan judul penelitian “Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Buton Selatan” menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa strategi dinas kesehatan dalam menekan laju penderita stunting yang diharapkan setiap tahunnya akan ada penurunan. Dengan adanya program gerakan masyarakat hidup sehat dan gerakan masyarakat peduli stunting dan dinas kesehatan aktifkan sosialisasi dengan melibatkan puskesmas, Lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan, agar ikut aktif dalam menekan penderita stunting ini karena peluang besar dalam menanggulangi pada masyarakat untuk mencapai masyarakat yang sehat dan mandiri. Penelitian selanjutnya oleh Iren Ressie Ridua (2020). Judul penelitian “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Menanggulangi Masalah Stunting” dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Upaya penanggulangan sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya baik karena kurangnya sosialisasi dari dinas terkait. Peneliti berikutnya oleh Daniel Kamarudin (2021) dengan judul penelitian “Komitmen Pemerintah Dalam Menangani Stunting Pada Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kasus Stunting Di Kelurahan Mamasa Terdiri Atas Dua Hal. Pertama, Program Pencegahan (Penyuluhan Khusus Ibu Rumah Tangga) Terdiri Dari: Pemberian Makanan Tambahan Anak Dan Pemberian Makanan Bayi Dan Anak Sejak Ibu Hamil Sampai Anak Berumur 2 Tahun. Penelitian selanjutnya oleh Della Trijuliana (2021) dengan judul penelitian “Komitmen Politik : Penegakan Hukum & Keberlanjutan Usaha Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Upaya Menurunkan Angka Stunting” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berhasilnya suatu kebijakan dinilai berdasarkan komitmen politiknya. Dalam kebijakan terkait stunting di Kota Tasikmalaya memang sudah baik namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan termasuk dalam dimensi penegakan hukum dan keberlanjutan usaha. Peneliti terdahulu yang terakhir oleh Arlinda Puspita Sari, Firdaus (2020) dengan judul penelitian “Penguatan Masyarakat Desa Panyampa Kabupaten Polewali Mandar Melalui Edukasi Stunting” menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh hasil evaluasi kepuasan kegiatan edukasi stunting menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berusia 25-34 tahun dan kini telah memiliki 2 hingga lebih dari 3 orang anak. sebanyak 65,31% peserta merasa sangat setuju bahwa narasumber menyampaikan materi dengan baik serta memberi tanggapan yang baik terhadap pertanyaan peserta. peserta juga memperoleh informasi yang baru mengenai stunting.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni komitmen politik pemerintah daerah dalam pencegahan dan penurunan *stunting* Di Kecamatan Bone Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini lebih memfokuskan pada komitmen yang dilakukan oleh pmda dalam mengatasi masalah stunting di kecamatan Bone.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis komitmen politik pemerintah daerah dalam pencegahan dan penurunan Stunting di Kecamatan Bone Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penurunan *Stunting* di Kecamatan Bone Kabupaten Muna Provinsi

Sulawesi Tenggara

3. Mengetahui dan menganalisis Upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan dan penurunan stunting di Kecamatan Bone Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan, sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Informan pada penelitian ini terdiri dari 3 instansi dan 5 masyarakat dengan kriteria tertentu. Analisis data dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Komitmen Politik Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penurunan Stunting di Kecamatan Bone Kabupaten Muna

Teori Komitmen Politik dari Brinkerhoff (2000;2010) yang mengungkapkan bahwa Komitmen Politik ini sulit dicari identifikasinya dan konsepnya seperti apa, lalu karakteristiknya bagaimana. Adanya struktur lembaga dikatakan sebagai respon praktis terhadap implementasi Komitmen Politik dan seringkali dikaitkan dengan proses birokrat dalam menjalankan sebuah kebijakan, Komitmen Politik pun diartikan sebagai wujud dari pengalokasian dana pemerintah untuk pencapaian hasil kebijakan, kapasitas dan tekanan publik lalu keterlibatan negara, aturan dan regulasi, serta tanggung jawab seseorang. Simpulan dari berbagai perspektif tersebut Brinkerhoff menarik makna sama dengan Political Will serta menyimpulkan bahwa ada lima dimensi untuk bisa mengukur Komitmen Politik yaitu Inisiatif Pemerintah, Prioritas, Mobilisasi Dukungan Politik, Penegakan Hukum dan Keberlanjutan Usaha.

a. Inisiatif Pemerintah

Pemerintahan kecamatan Bone harus memiliki strategi khusus yaitu dengan pendekatan, memfasilitasi serta mendukung pemberian pelayanan kesehatan dan gizi, dengan adanya posyandu yang di adakan setiap bulan bersamaan dengan sosialisasi kesehatan pada masyarakat serta pemenuhan gizi yang di berikan oleh pihak puskesmas baik itu vitamin dan bahan makanan tambahan untuk mencukupi gizi anak, hal ini tidak terlepas dari pantauan bantuan pemerintah daerah Kecamatan Bone.

b. Prioritas

Kepala Kecamatan Bone memiliki komitmen program pencegahan dan penurunan *stunting* berdasarkan strategi yang dilakukan dengan mengalokasikan dana desa sebagai anggaran pencegahan stunting dengan mencukupi kebutuhan masyarakat seperti vitamin dan makanan pendamping, penyebab terbesar dari angka terjadinya stunting adalah kurangnya pengetahuan dan pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Bone.

c. Mobilisasi Dukungan Politik

Peraturan Bupati Muna No 5 tahun 2020 tentang konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting di desa, sudah memberikan dukungan sarana dan prasarana baik itu dari segi bantuan pembangunan posyandu di setiap desa di Kecamatan Bone serta adanya kader kader dalam membantu kegiatan pelayanan kesehatan di setiap desanya, sudah adanya pelayanan serta pemberian anggaran berfokus pada pemberian nutrisi gizi yang baik pada masyarakat namun sarana yang ada di setiap desanya masih belum memadai contohnya alat pemeriksaan kesehatan, yang mana hal ini sangat penting dalam menunjang suatu pemeriksaan,. Prasarana yang telah diberikan juga masih kurang digunakan dengan baik karena fasilitas tersebut masih terpenuhi. Namun hal ini sudah menjadi target dan bahan

perhatian dari pihak pemerintah Kecamatan bone untuk melakukan pembangunan yang lebih baik. Dalam pencegahan dan penurunan stunting melibatkan beberapa pemerintahan mulai dari DPRD, Kepala Kecamatan, Kepala Desa, Kepala Puskesmas Kecamatan Bone serta Tenaga Ahli Kesehatan Gizi dengan target tertentu.

d. Penegakan Hukum

Landasan dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan pemerintah. Landasan hukum di tingkat nasional yang mendukung penurunan prevalensi stunting adalah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG, Pedoman Penyusunan RAD-PG, dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAN/RAD-PG, Surat Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tim Teknis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dan Surat Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D1.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

e. Keberlanjutan Usaha

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 389 tahun 2021 tentang penetapan hasil penilaian kinerja kabupaten lokasi fokus pelaksanaan konvergensi penurunan stunting terintegrasi di Sulawesi Tenggara tahun 2021, Partisipasi masyarakat dalam program yang di berikan oleh pemerintah daerah kecamatan bone sangat di terima baik dan di apresiasi oleh masyarakat dengan ikut serta kegiatan kegiatan sosialisasi dan juga posyandu, ada sekitar 80% masyarakat yang selalu ikut dalam kegiatan kesehatan tersebut, namun masih ada 20% masyarakat yang kurang berpartisipasi di karenakan, kurangnya pemahaman dan juga kurangnya transportasi untuk mengikuti kegiatan tersebut, sehingga pemerintah desa mulai memberikan pelayanan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses kegiatan kegiatan yang dilaksanakan.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting

a. Faktor Pendukung

- Adanya suatu kerja sama dengan berbagai instansi baik pemerintahan dan kesehatan untuk Bersama sama bekerja serentak serta mendukung penuh baik secara sarana, prasarana dan transportasi dalam pencegahan dan penurunan stunting.
- Peningkatan pemahaman masyarakat dengan adanya sosialisasi dan juga posyandu, agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pencegahan, penanganan dan tindak lanjut *stunting* yang dilakukan oleh masyarakat, melalui pendekatan kegiatan PKK dan saat adanya posyandu.
- Adanya peran aktif yang dilakukan oleh masyarakat dalam berpartisipasi dan menerima informasi terkait pencegahan dan penurunan *stunting* sebagai pembekalan mengenai gizi yang baik dan pentingnya hidup sehat.
- Adanya kemauan, kemampuan, dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Faktor Penghambat

1) Masih minimnya kesadaran dari ibu hamil dan masyarakat.

Rendahnya kesadaran pada ibu hamil dan masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya stunting karena banyaknya dari ibu hamil dan juga masyarakat malas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin yang mana pemeriksaan kesehatan dan pemberian makanan bergizi seimbang serta vitamin pada saat hamil dan perkembangan anak merupakan suatu hal terpenting untuk kesehatan anak dalam kandungannya serta dalam hidupan perkembangan anak.

2) Masih Kentalnya Adat dan Budaya

Suatu adat istiadat serta warisan dari nenek moyang yang diturunkan secara turun temurun sampai saat ini menyebabkan konsumsi gizi untuk anak masih kurang dan belum sesuai dengan suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak.

3.3 Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Hambatan dalam melakukan Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting

1. Meningkatkan Kerjasama antara instansi terkait

Berdasarkan kebijakan dan komitmen program dari pemerintah daerah dan puskesmas di Kecamatan Bone, sangat diterima oleh masyarakat serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan ini menambah pengetahuan dari sosialisasi dan posyandu yang diberikan, hal ini lah membuat satu tahun terakhir ini membuat angka stunting di Kecamatan Bone mulai menurun dibanding tahun sebelumnya.

2. Memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada masyarakat serta ibu hamil.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Puskesmas salah satu upaya yang diberikan kepada masyarakat terkait pencegahan dan penurunan stunting yang mana petugas gizi sudah mendata seluruh masyarakat yang kurang akan gizi dan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penurunan stunting, bukan itu saja tetapi kami memberikan pengetahuan tentang pernikahan dini agar mencegah terjadinya stunting pada anak.

3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan dan penurunan stunting sangat di terima baik dan di apresiasi oleh masyarakat dengan ikut serta kegiatan sosialisasi dan juga posyandu, ada sekitar 80% masyarakat yang selalu ikut dalam kegiatan kesehatan tersebut, namun masih ada 20% masyarakat yang kurang berpartisipasi di karenakan, kurangnya pemahaman dan juga kurangnya transportasi untuk mengikuti kegiatan tersebut, sehingga pemerintah desa mulai memberikan pelayanan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses kegiatan yang dilaksanakan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pembahsan di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa temuan penelitian terkait Komitmen Politik Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Dan Penurunan *Stunting* Di Kecamatan Bone Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu *Pertama*, Pencegahan dan penurunan stunting di kecamatan Bone telah melakukan berbagai macam cara agar stunting dapat berkurang setiap tahunnya. Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan membentuk tim koordinasi dengan berbagai instansi karena banyaknya masyarakat yang masih memiliki pengetahuan yang kurang terkait tentang pentingnya kesehatan anak. *Kedua*, Adapun faktor pendukung pemerintah daerah dalam pencegahan dan penurunan stunting yaitu adanya suatu kerja sama dengan berbagai instansi baik pemerintahan dan kesehatan, Peningkatan pemahaman masyarakat dengan adanya sosialisasi, Adanya peran aktif yang dilakukan oleh masyarakat dalam berpartisipasi dan menerima informasi terkait pencegahan

dan penurunan stunting, Adanya kemauan, kemampuan, dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh pemerintah. *Ketiga*, faktor penghambatnya Masih minimnya kesadaran dari ibu hamil dan masyarakat khususnya ibu hamil apabila telah selesai proses persalinan tidak melakukan pemeriksaan dan perkembangan pada anak serta Masih Kentalnya Adat dan Budaya serta warisan dari nenek moyang yang diturunkan secara turun temurun sampai saat ini menyebabkan konsumsi gizi untuk anak masih kurang dan belum sesuai dengan suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak. *Keempat*, Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penurunan stunting antara lain sebagai berikut: Meningkatkan Kerjasama antar instansi terkait, Memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada masyarakat serta ibu hamil kecamatan Bone, serta Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai komitmen politik pemerintah daerah dalam pencegahan dan penurunan *stunting* Di Kecamatan Bone Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dapat disimpulkan bahwa Pencegahan dan penurunan stunting di kecamatan Bone telah melakukan berbagai macam cara agar stunting dapat berkurang setiap tahunnya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian selanjutnya terkait hasil dari komitmen pemerintah daerah Kecamatan Bone Kabupaten Sulawesi Tenggara dalam menurunkan dan mencegah angka stunting di tahun yang akan datang.

V. UCAPAN TERIMKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Muna beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N., Nastia, N., & Sadat, A. (2022). Strategi Dinas Kesehatan Dalam menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Butan Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 643–648.
- Brinkerhoff, D. W. (2010). Unpacking the concept of political will to confront corruption. *U4 Brief*, 2010(1), 1–4.
- Daniel, D., Tone, K., Latief, A., & Nadir, M. (2021). Komitmen Pemerintah Daerah dalam Menangani Stunting pada Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa. *Journal Pegguruang*, 3(1), 233–238.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 389 Tahun 2021. (2021). *tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten Lokasi Fokus Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting Terintegritas Di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021*. Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun tahun 2017. (2017). *tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi*. Presiden Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013. (2013). *tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi*. Presiden Republik Indonesia.
- Ridua, I. R., & Djurubassa, G. M. P. (2020). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera

Timur Dalam Menanggulangi Masalah Stunting. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(2), 135–151.

Rizki, M. F., & Argenti, G. (2020). Komitmen Politik: Penegakan hukum & Keberlanjutan Usaha Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Upaya Menurunkan Angka Stunting. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 3(2), 88–102.

Sari, A. P., Firdaus, F., & Irfan, M. (2021). Penguatan Masyarakat Desa Panyampa Kabupaten Polewali Mandar Melalui Edukasi Stunting. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 643–648.

